

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini memberlakukan sistem pemerintahan desentralisasi dimana tuntutan terhadap suatu daerah untuk menyelenggarakan pembangunan yang tepat dan dapat meningkatkan perekonomian daerah agar semakin tajam yang ditandai dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah. Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan pembangunan daerah sesuai dengan potensi keuangan daerah untuk membuktikan bahwa mereka menjalankan kewenangan pemerintah (Purba, 2018).

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Adanya otonomi daerah, maka sangat dibutuhkan akuntabilitas baik secara vertikal (kepada pemerintah atas) maupun secara horizontal (kepada masyarakat daerah) atas pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat (Syarifudin, 2020).

Pada dasarnya akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2014). Terkait dengan masalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut maka dari itu pemerintah mengeluarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik.

Disuatu pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan yang transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta eektivitas untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaa keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik maka dibutuhkan pertanggungjawaban masing-masing daerah atau penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh suatu daerah yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Hasanah, 2019). Akan tetapi diperlukan juga variabel independen seperti penerapan *value for money* dan standar akuntansi pemerintah sehingga apabila konsep ini berjalan, dengan demikian tujuan dari variabel dependen akan terlaksana dengan baik.

Adapun beberapa hasil penelitian peneliti yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan daerah yaitu, Mulyani (2018) menyatakan bahwa *value for money* tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sedangkan Anita Daun Lamba (2020) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, menurut Pramuditia (2017) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta Nurwulan, Dkk (2019) menyatakan bahwa kinerja *value for money* berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena yang tertera di atas dan adanya suatu perbedaan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengangkat judul “ **Pengaruh *Value For Money* serta Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?
2. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Untuk mengetahui apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan pengetahuan serta informasi kepada peneliti selanjutnya mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta memberikan bukti teoritis bagi peneliti selanjutnya pada bidang yang sama pada masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam peningkatan kinerja pada pengelolaan keuangan disuatu daerah.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan teruntuk bagian akuntansi keuangan daerah serta menjadikan bahan bacaan bagi mahasiswa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi sebagai pertimbangan dan pemikiran untuk memutuskan masalah baru dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mencakup pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini hanya dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Palopo.

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga pembahasan tidak menjadi luas dan menyimpang. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian ini pada variabel bebas yaitu *value for money* (X1) dan penerapan standar akuntansi pemerintah (X2), sementara variabel terikatnya adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan gambarn yang utuh mengenai penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusa masalah, tujuan penelitin, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional, instrument penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan analisis tambahan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Stewardship

Menurut Hernandez (2008) *stewardship* didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok diatas tujuan pribadi yang melayani kepentingan pribadi seseorang. Ini ada sejauh aktor organisasi mengambil tanggung jawab pribadi atas dampak tindakan organisasi terhadap kesejahteraan *stakeholder*. Davis *et al.*, (1997) menemukan bahwa seorang pelayan menjaga dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui kinerja perusahaan. peningkatan kinerja perusahaan mengakibatkan fungsi utilitas pelayanan dapat dimaksimalkan (Vallejo, 2009).

Teori *stewardship* dapat berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban untuk dapat memastikan pemantauan, audit dan pelaporan yang baik agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi (Crib, 2006). Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*.

Menurut mulyani (2018), terjadinya relasi antar manusia merupakan relasi antar sesame, karena karakteristik masyarakat dapat dipercaya oleh pihak lain, khususnya dibidang keuangan, pemerintah diharapkan dapat menciptakan transparansi bagi masyarakat sesuai dengan harapan dan keyakinannya. Menurut Podrug (2011) dengan berdasarkan dari teori *sterwarship* adalah bahwa para

manajer selalu bertindak sedemikian rupa untuk memaksimalkan kepentingan perusahaan dan lingkungan bisnis kontemporer memaksa manajemen menuju bisnis yang bertanggung jawab secara etis, inovatif, tetapi pada saat yang sama juga baik bahwa manajer yang berhasil meningkatkan kinerja organisasi biasanya dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar kelompok, karena kepentingan sebagian besar kelompok pemangku kepentingan dapat dipenuhi dengan baik dengan meningkatkan kekayaan organisasi.

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah dapat menafsirkan tujuan ekonomi, pelayanan publik dan kesejahteraan dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan memberinya tanggung jawab keuangan, sehingga menjelaskan bahwa pemerintah daerah (pengelola) dapat dipercaya serta sejalan dengan kepentingan umum.

2.2 Value For Money

2.2.1 Pengertian *Value For Money*

menurut mahmudi (2015), *value for money* adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi.

Organisasi sektor publik sering dinilai sebagai sarana inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi sehingga adanya tuntutan baru agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya (sayuti, 2018). Menurut Mardiasmo (2009) *value for money* merupakan inti dari pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintah.

Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari keluaran yang dihasilkan saja, tetapi harus mempertimbangkan masukan, keluaran dan hasil bersama-sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *value for money* merupakan penerapan dari tiga konsep pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan dan sektor publik yaitu ekonomi, efisien dan efektivitas.

2.2.2 Konsep Value For Money

Value for money merupakan konsep prinsip-prinsip manajemen organisasi sektor publik yang fundamental terhadap tiga elemen utama (Mardiasmo, 2009), yaitu :

1. Ekonomi

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan input (biaya input). Dengan kata lain ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik. Dalam konteks organisasi pemerintahan, ukuran ekonomi adalah seberapa besar anggaran dialokasikan untuk membiayai kegiatan tertentu.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah rasio keluaran / masukan yang digunakan dengan mengacu pada standar atau target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau pekerjaan tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah mungkin.

3. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan atau sasaran (*outcome*) yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi keluaran untuk pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut.

Suatu organisasi, program, atau kegiatan dianggap efektif apabila keluaran yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

2.2.3 Manfaat penerapan konsep *value for money*

Implementasi konsep *value for money* diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas dan kinerja sektor publik. Menurut Mardiasmo (2009), manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya efisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

2.3 Standar Akuntansi Pemerintah

2.3.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan hasil dari undang-undang nomor 71 tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Adapun definisi standar akuntansi pemerintahan menurut Indra Bastian (2010) adalah “standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan

persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah serangkaian prosedur, operator, alat dan elemen lain yang sistematis untuk mewujudkan fungsi akuntansi dari saat analisis transaksi hingga pelaporan keuangan dalam organisasi pemerintah. Dalam peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2019, ruang lingkup pengaturan peraturan pemerintah ini meliputi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan berbasis *cash to accrual*. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD.

2.3.2 Penerapan standar akuntansi pemerintah

variabel penerapan standar akuntansi pemerintah diukur dengan 3 indikator yaitu : penerapan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas, penerapan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta penyajian secara wajar. Menurut Weskornis (2018), penerapan standar akuntansi pemerintahan mengharuskan semua organisasi yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait memiliki pemahaman yang utuh. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah wajib dilaksanakan, namun dalam penerapannya perlu dipahami beberapa alasan penting sehingga diharapkan dapat membantu penerapan standar.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Negara dan pelaporan keuangan pemerintah (Mahmudi, 2011). Penerapan standar akuntansi pemerintah diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Nunuy Nur Afiah (2009) standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah pada dasarnya mengatur tiga hal sebagai berikut:

2.1 Pengakuan

Pengakuan adalah proses untuk menentukan apakah memenuhi criteria pencatatan satu atau lebih peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga menjadi bagian tambahan dari aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, pengeluaran dan elemen pembiayaan yang akan dimasukkan dalam entitas pelapor yang relevan.

2.2 Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan nilai moneter setiap item yang akan dikonfirmasi dan dimasukkan dalam laporan keuangan. Item-item dalam laporan keuangan diukur dengan menggunakan biaya historis. Aset dicatat sebesar nilai wajar dari jumlah kas yang dikeluarkan dan setara kas atau imbalan bayaran untuk membeli aset tersebut. Kewajiban disajikan sebesar nilai nominal.

2.3 Pengungkapan

Laporan keuangan memberikan informasi lengkap yang dibutuhkan oleh pengguna. informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat

ditempatkan pada lembar depan laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

2.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.4.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Daerah

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan melalui laporan keuangan secara terbuka kepada pihak yang mempunyai hak atas pertanggungjawaban tersebut. Menurut Setiana dan Yuliani (2017) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban. Menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Dengan kata lain akuntabilitas pengelola daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta penatausahaan yang disertai dengan pertanggungjawaban yang harus benar-benar dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

2.4.2 Peran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Wahida (2015) indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan terdiri dari:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probability and legality*).

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan memastikan

kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lain yang diperlukan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik ditinjau dari kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses terwujud melalui penyediaan pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan murah.

3. Akuntabilitas program (program akuntabilitas)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak dan apakah alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal telah dipertimbangkan.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas Kebijakan berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.5 Penelitian Terdahulu

Pencarian dari penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya menjelaskan tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, sekaligus untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

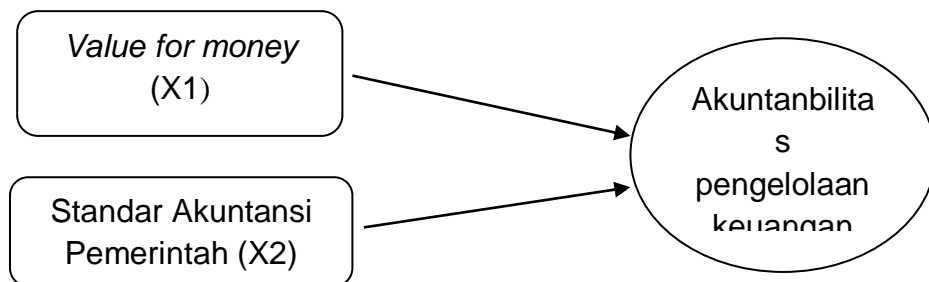
No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Anita Daun Lamba (2020) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan <i>Value For Money</i> terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Bpkad Kota Palopo)	Metode kuantitatif	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. serta <i>Value for money</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor BPKAD Kota Palopo.
2	Mulyani (2018) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, <i>Value For Money</i> , dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Skpd Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018)	Metode Kuantitatif	pengaruh penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. <i>Value For Money</i> tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3	Pramuditia (2017) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi , <i>Value For Money</i> , dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Ponogoro)	Metode Kuantitatif	variabel standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Hal ini di karenakan pemerintah telah mampu menerapkan basis kas untuk mengakui pendapatan , belanja dan pembiayaan dan selalu mengoreksi setiap kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Variabel <i>value for money</i> tidak berpengaruh

			terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4	Nurwulan, Dkk (2019) Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kinerja <i>Value For Money</i> terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survey Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Pendapatan Daerah dan Inspektorat Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi)	Metode Kuantitatif	kinerja <i>value for money</i> berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
5	Shintia (2017), Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Pengendalian Internal Dan <i>Value For Money</i> terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Kudus)	Metode kuantitatif	variabel <i>value for money</i> berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.
6	Yani, A. A. (2020), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Konsep <i>Value For Money</i> , dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Digital (Di Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bkad) Provinsi Sulawesi Selatan).	Metode kuantitatif	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di era Digital, serta Konsep <i>Value for Money</i> berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di era digital.
7	Maya Angelicca (2019), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Studi Di Pemerintah Daerah Kab. Lamandau Kalimantan Tengah	Metode kuantitatif	Penerapan SAP mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
8	Julie Abdullah (2018), Pengaruh Penerapan Dimensi <i>Value For Money</i> terhadap Akuntabilitas Publik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten	Metode kuantitatif	Penerapan <i>value or money</i> berpengaruh positif terhadap akuntabilitas public pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

	Pohuwato		
9	Sako, U., & Lantowa, F. D. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.	Metode kuantitatif	Penerapan SAP mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.
10	SELVI, M. (2020). Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan (<i>Doctoral dissertation</i> , Universitas Muhammadiyah Palopo).	Metode kuantitatif	Penerapan Standar Akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan di amati atau di ukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa variabel yaitu *value for money* (X1) dan Standar akuntansi pemerintah (X2) pada kantor BPKAD Kota Palopo untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). untuk memudahkan penelitian ini kerangka konseptual dapat di gambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.7 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H2 : Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif deskriptif, yang memberikan gambaran di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan (Sugiyono, 2019).

3.2 Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo yang berada di Jl.Jend Sudirman no 163, Binturu, Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dengan waktu yang digunakan dalam penelitian ini ± 3 bulan terhitung bulan April sampai dengan Juni 2022.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulanya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat pegawai yang berada di Kantor BPKAD Kota Palopo yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Sugiyono (2019) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, dimana sampel di dalam penelitian ini sebanyak 40 responden. Adapun criteria pengambilan sampel yaitu pegawai yang lulusan minimal jenjang SMA dan telah bekerja \pm 5 tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *convenience sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel non-probability dimana pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen yang ada dan kemudahan untuk mendapatkannya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif merupakan metode analisis data yang menggunakan perhitungan digital yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan pemecahan masalah.

2. Sumber Data

Sumber data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2016) data primer adalah “Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung menyediakan data untuk pengumpulan data”. Sedangkan sumber data sekunder menurut Sugiyono (2016) adalah: “Sumber data tidak akan langsung diberikan kepada pengumpul data. Saat peneliti mengumpulkan informasi dari data yang diolah pihak lain, digunakan data sekunder.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer, yaitu berupa jawaban dari responden terhadap pernyataan yang terdapat dikuesioner

yang dibagikan dan dikumpulkan dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Palopo.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik penumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian. Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden yang fungsinya untuk menggali informasi. Kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan mereka akan memberikan respon terhadap daftar pertayaam tersebut.

3.6 Varibel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2013), variabel penelitian adalah adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Varibel bebas (*Independen Variabel*), adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (*Independen variabel*) adalah *Value For Money* (X_1) dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_2).

2. Variabel Terikat (*Dependen Variabel*), adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas, dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (*dependent variabel*) adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y).

3.6.2 Definisi operasional variabel

Berikut ini adalah definisi operasional variabel dari penelitian ini:

1. *Value For Money* (X_1), *Value For Money* dalam penelitian ini adalah konsep dasar dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kerja *value for money* adalah untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi yang berada di kantor BPKAD Kota Palopo.
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_2), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penelitian ini di mana dilakukan pada Kantor BPKAD Kota Palopo adalah diharapkan dapat menjadikan tolak ukur dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabelnya pengelolaan keuangan daerah agar mewujudkan pemerintahan yang baik.
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam penelitian ini adalah mempertanggungjawabkan, menyajikan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas proses pengelolaan keuangan yang ada di kantor BPKAD Kota Palopo.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur nilai Variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini instrument penelitian yang digunakan

berupa angket atau kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti yang berisi beberapa item pertanyaan tentang persepsi terhadap penelitian. Instrument penelitian ini menggunakan skala likert yang disajikan sebagai berikut:

1. Sangat setuju (SS) = 5
2. Setuju (S) = 4
3. Kurang setuju (KS) = 3
4. Tidak setuju (TS) = 2
5. Sangat tidak setuju (SKS) = 1

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik regresi linear berganda dimana alat analisis yang digunakan adalah program SPSS *versi 22 for windows*, dimana program komputer yang digunakan untuk menganalisis data dengan analisis statistik.

3.8.1 Uji instrumental Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Uji validitas dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung korelasi antara skor item masing-masing pertanyaan dengan skor pertanyaan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Sosial Science*). Pengujian validitas memiliki kriteria jika nilai sig. (2-tailed) pada total skor konstruk $< 0,05$ atau jika r hitung lebih besar dari r tabel (pada

taraf signifikansi 0,05), maka butir pernyataan atau indikator tersebut dikatakan “valid” dan sebaliknya.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat yang bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan. Dalam pengujian reliabilitas ini, peneliti menggunakan metode *Statistic Cronback Alpha* dengan signifikansi yang digunakan sebesar 0,6 dimana jika nilai nilai *Cronback Alpha* dari suatu tabel lebih besar dari 0,6 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrument tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai *Cronback Alpha* lebih kecil dari 0,6 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel.

3.8.2 Uji asumsi klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, outokorelasi, tidak mengandung heteroskedastisitas, dan linieritas (Suliyanto, 2011).

Uji asumsi klasik meliputi:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual

dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng (*bell-shaped curve*) yang kedua sisinya melebar sampai tidak terhingga. Uji normalitas disini tidak dilakukan per variabel tetapi hanya terhadap nilai residual terstandarisasinya (Suliyanto, 2011).

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam modal regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak maka regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier (Suliyanto, 2011). Multikolinieritas akan membuat variabel-variabel independen tidak sama dengan nol. Mendeteksi adanya multikolinieritas dapat digunakan nilai tolerance dan *varian inflation factor* (VIF) sebagai tolak ukur. Apabila nilai tolerance lebih dari sama dengan 0,10 dan nilai VIF kurang dari sama dengan 10 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat multikolinieritas (Ghozali,2011).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* merupakan uji statistik yang digunakan untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kebalikan dari uji ini adalah *homoskedastisitas*, yaitu terjadi jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Di dalam analisis regresi, model yang tepat dalam menerangkannya adalah jika tidak terjadi *heteroskedastisitas* atau model regresi yang terjadi

homoskedastisitas. Pelaksanaan uji ini dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara lain prediksi variabel terkait (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID.

3.8.3 Uji regresi linear berganda

Regresi linier berganda merupakan sebuah regresi yang mana jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksikan variabel tergantung dipengaruhi dua atau lebih variabel bebas (Suliyanto, 2011). Sehingga persamaan regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + e$$

Keterangan:

Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

α : Konstanta

$\beta_1 \beta_2$: Koefisien regresi

x_1 : *Value For Money*

x_2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

e : Error

3.8.4 Uji hipotesis

1. Uji koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel bebas (Suliyanto, 2011). Untuk menghitung koefisien determinasi diperlukan nilai

kuadrat selisih Y riil dengan nilai Y prediksi dan nilai kuadrat selisih nilai Y riil dengan nilai Y rata-rata.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara parsial (individual) dalam menerangkan variabel dependen. Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial atau individu menerangkan pengaruh terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan yaitu dengan nilai signifikansi 0,05 dan membandingkan t hitung dengan t tabel yang ditentukan sebagai berikut, Apabila tingkat signifikansi $< \alpha$ (0,05) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila tingkat signifikansi $> \alpha$ (0,05) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

3. Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian bersama-sama variabel independen yang dilakukan untuk melihat variabel independen. Pengujian ini hanya digunakan untuk mengetahui apakah model yang digunakan sudah tepat. Kriteria dalam menguji statistik F sebagai berikut, bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas $<$ nilai signifikan (0,05), maka hipotesis tidak dapat ditolak, ini berarti bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas $>$ nilai signifikan (0,05), maka

hipotesis diterima, ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi hasil penelitian

4.1.1 Gambaran umum BPKAD kota palopo

Pada awal dibentuknya Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah kota palopo. Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembentukan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Setelah adanya peraturan daerah kota palopo nomor 08 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah, dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).

4.1.2 Tugas Dan Fungsi BPKAD Kota Palopo

Secara umum kepala badan mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sedangkan berdasarkan fungsinya badan pengelolaan keuangan dan aset daerah menyelenggarakan:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah
- b. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah (BUD) penyelenggaraan kegiatan teknik operasional dan fungsional dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

- c. Pengordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan Walikota Palopo nomor 57 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota palopo yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah juga berperan sebagai pejabat pengelolaan keuangan daerah sekaligus bendahara umum daerah, sebagaimana di atur dalam peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

4.1.3 Visi Dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)

a. Visi

“terwujudnya Kota Palopo sebagai Kota pendidikan, jasa, niaga dan agro industry yang berwawasan agama, budaya dan lingkungan yang terkemuka di Indonesia”

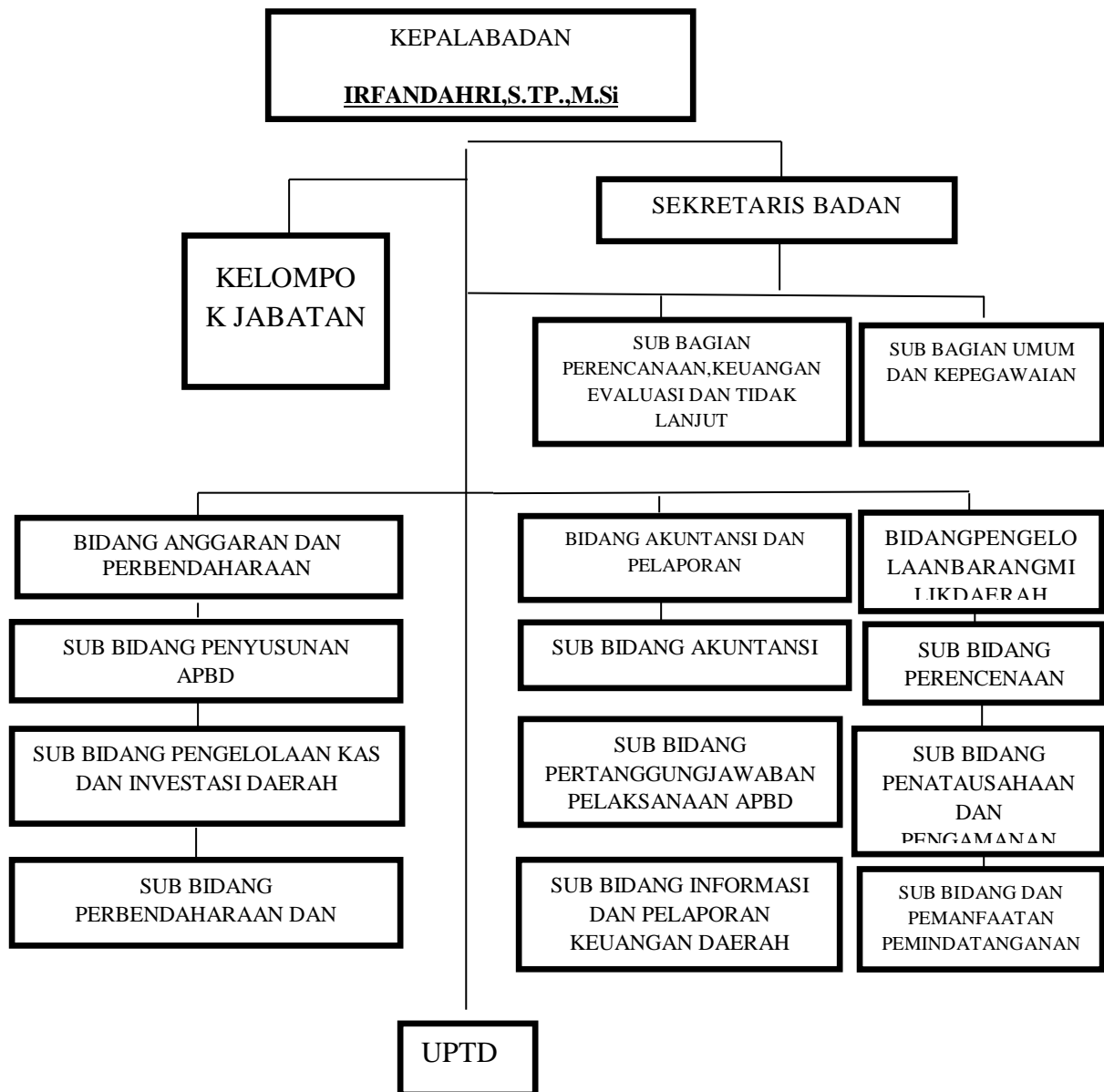
b. Misi

1. Meningkatkan kualitas Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat pelaksana Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah;

3. Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Pengelolaan Keuangan Dan Manajemen Aset Daerah;

4.1.4 Struktur Organisasi BPKAD Kota Palopo

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) kota palopo terdapat susunan organisasi yang terdiri dari:



4.2 Deskripsi Data

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada kantor BPKAD Kota Palopo. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner pada Kantor BPKAD sebanyak 53 eksamplar dan diberikan pada pegawai yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Jumlah kuesioner yang dikembalikan dan dapat digunakan sebanyak 45 eksamplar, atau tingkat pengembalian data kuesioner sebanyak 85%. Adapun rincian dapat dilihat

Tabel 4.1 Pengumpulan Data Primer Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase %
1.	Distribusi Kuesioner	53	100%
2.	Kuesioner Kembali	45	85%
3.	Kuesioner Cacat/Tidak Kembali	8	18%
4.	Kuesioner yang dapat diolah	45	85%

n sampel yang kembali = 45

Responden rate = $\frac{45}{53} \times 100\%$

53

= 85%

Sumber: Data yang diolah(2022)

Dari 53 kuesioner yang dibagikan kepada pegawai yang kerja di Kantor BPKAD Kota Palopo, terdapat 8 kuesioner yang cacat atau tidak kembali dikarenakan pada saat dilakukan penelitian tidak semua pegawai berada ditempat. Sebanyak 45 orang pegawai yang bekerja di Kantor BPKAD Kota Palopo berhasil dikumpulkan sebagai responden dalam penelitian ini. Demografi responden dapat

diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Demografi Responden

Keterangan	Jumah (orang)	Persentase(%)
Jenis Kelamin :		
a. Laki-laki	22	49%
b. Perempuan	23	51%
Total	45	100%
Tingkat Pendidikan		
a. SMA/Sederajat	15	33%
b. Diploma	2	4%
c. Strata -1 (S1)	26	58%
d. Strata -2 (S2)	2	4%
Total	45	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2022)

4.2.1 Uji statistik deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagai mana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum Sugiono (2012). Analisis statistik deskriptif ini meliputi tabel, grafik, rata-rata (*mean*), standar deviasi nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah penelitian sehingga penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif yang diolah dengan menggunakan SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.3 Uji Statistik Deskriptif *Value for money***X1.1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	2	4.4	4.4	4.4
S	20	44.4	44.4	48.9
SS	23	51.1	51.1	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *value for money* yang menjawab “kurang setuju” 2 orang atau 4,4% , yang menjawab “setuju” 20 orang atau 44,4% dan yang menjawab “sangat setuju” 23 orang atau 51,1% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,47 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	16	35.6	35.6	35.6
S	11	24.4	24.4	60.0
SS	18	40.0	40.0	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *value for money* yang menjawab “atau 35,6% , yang menjawab “setuju” 20 orang atau 44,4% dan yang menjawab kurang setuju” 16 orang “sangat setuju” 18 orang atau 40,0% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,04 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	25	55.6	55.6	55.6
SS	20	44.4	44.4	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *value for money* yang menjawab “setuju” 25 orang atau 55,6% dan yang menjawab “sangat setuju” 20 orang atau 44,4% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,44 atau rata-rata menjawab setuju.

X1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	1	2.2	2.2	2.2
S	24	53.3	53.3	55.6
SS	20	44.4	44.4	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *value for money* yang menjawab “kurang setuju” 1 orang atau 2,2% , yang menjawab “setuju” 24 orang atau 53,3% dan yang menjawab “sangat setuju” 20 orang atau 44,4% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,42 atau rata-rata menjawab setuju.

X1.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	1	2.2	2.2	2.2
KS	11	24.4	24.4	26.7
S	14	31.1	31.1	57.8
SS	19	42.2	42.2	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *value for money* yang menjawab “tidak setuju” 1 orang atau 2,2%, yang menjawab “kurang setuju” 11 orang atau 24,4% , yang menjawab “setuju” 14

orang atau 31,1% dan yang menjawab “sangat setuju” 19 orang atau 42,2% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,13 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X1.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	1	2.2	2.2	2.2
S	26	57.8	57.8	60.0
SS	18	40.0	40.0	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *value for money* yang menjawab “kurang setuju” 1 orang atau 2,2% , yang menjawab “setuju” 26 orang atau 57,8% dan yang menjawab “sangat setuju” 18 orang atau 40,0% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,38 atau rata-rata menjawab setuju.

X1.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
S	20	44.4	44.4	44.4
SS	25	55.6	55.6	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *value for money* yang menjawab “setuju” 20 orang atau 44,4% dan yang menjawab “sangat setuju” 25 orang atau 55,6% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,56 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X1.8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	6	13.3	13.3	13.3
S	19	42.2	42.2	55.6
SS	20	44.4	44.4	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *value for money* yang menjawab”kurang setuju” 6 orang atau 13,3% ,yang menjawab “setuju” 19 orang atau 42,2% dan yang menjawab “sangat setuju” 20 orang atau 44,4% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,31 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X1.9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	4	8.9	8.9	8.9
S	18	40.0	40.0	48.9
SS	23	51.1	51.1	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *value for money* yang menjawab”kurang setuju” 4 orang atau 8,9% ,yang menjawab “setuju” 18 orang atau 40,0% dan yang menjawab “sangat setuju” 23 orang atau 51,1% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,42 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X1.10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	2	4.4	4.4	4.4
S	21	46.7	46.7	51.1
SS	22	48.9	48.9	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *value for money* yang menjawab”kurang setuju” 2 orang atau 4,4% ,yang menjawab “setuju” 21 orang atau 46,7% dan yang menjawab “sangat setuju” 22 orang atau 48,9% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,44 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Tabel 4.4 Uji Statistik Deskriptif Penerapan Standar Akuntansi

X2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	19	42.2	42.2	42.2
SS	26	57.8	57.8	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “setuju” 19 orang atau 42,2%, dan menjawab “Sangat Setuju” 36 orang atau 57,8% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,58 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	15	33.3	33.3	33.3
SS	30	66.7	66.7	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “Setuju” 15 orang atau 33,3%, dan yang menjawab “ sangat setuju “ 30 orang maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,67 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
S	13	28.9	28.9	28.9
Valid SS	32	71.1	71.1	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “setuju” 13 orang atau 28,9% dan yang menjawab “sangat setuju” 32 orang atau 71,1% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,71 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X2.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	1	2.2	2.2	2.2
Valid S	23	51.1	51.1	53.3
SS	21	46.7	46.7	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “kurang setuju” 1 orang atau 2,2% , yang menjawab “setuju” 23 orang atau 51,1% dan yang

menjawab “sangat setuju” 21 orang atau 46,7% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,44 atau rata-rata menjawab setuju

X2.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	2	4.4	4.4	4.4
S	22	48.9	48.9	53.3
SS	21	46.7	46.7	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “kurang setuju” 2 orang atau 4,4% , yang menjawab “setuju” 22 orang atau 48,9% dan yang menjawab “sangat setuju” 21 orang atau 46,7% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,42 atau rata-rata menjawab setuju.

X2.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	1	2.2	2.2	2.2
S	22	48.9	48.9	51.1
SS	22	48.9	48.9	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “kurang setuju” 1 orang atau 2,2% , yang menjawab “setuju” 22 orang atau 48,9% dan yang menjawab “sangat setuju” 22 orang atau 48,9% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,47 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X2.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	4	8.9	8.9	8.9
S	21	46.7	46.7	55.6
SS	20	44.4	44.4	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “kurang setuju” 4 orang atau 8,9% , yang menjawab “setuju” 21 orang atau 46,7% dan yang menjawab “sangat setuju” 20 orang atau 44,4% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,36 atau rata-rata menjawab setuju.

X2.8

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	4	8.9	8.9	8.9
S	17	37.8	37.8	46.7
SS	24	53.3	53.3	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “kurang setuju” 4 orang atau 8,9% , yang menjawab “setuju” 17 orang atau 37,8% dan yang menjawab “sangat setuju” 24 orang atau 53,3% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,44 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X2.9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	3	6.7	6.7	6.7
S	22	48.9	48.9	55.6
SS	20	44.4	44.4	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “kurang setuju” 3 orang atau 6,7% , yang menjawab “setuju” 22 orang atau 48,9% dan yang menjawab “sangat setuju” 20 orang atau 44,4% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,38 atau rata-rata menjawab setuju.

X2.10

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
S	22	48.9	48.9	48.9
SS	23	51.1	51.1	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “setuju” 22 orang atau 48,9% , dan yang menjawab “sangat setuju” 23 orang atau 51,1% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,51 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Tabel 4.5 Uji Statistik Deskriptif Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**Y.1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	1	2.2	2.2	2.2
S	18	40.0	40.0	42.2
SS	26	57.8	57.8	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangann daerah yang menjawab "kurang setuju" 1 orang atau 2,2% ,yang menjawab "setuju" 18 orang atau 40,0% dan yang menjawab "sangat setuju" 26 orang atau 57,8% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,56 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	1	2.2	2.2	2.2
S	21	46.7	46.7	48.9
SS	23	51.1	51.1	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangann daerah yang menjawab "kurang setuju" 1 orang atau 2,2% ,yang menjawab "setuju" 21 orang atau 46,7% dan yang menjawab "sangat setuju" 23 orang atau 51,1% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,49 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	1	2.2	2.2	2.2
S	23	51.1	51.1	53.3
SS	21	46.7	46.7	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjawab "kurang setuju" 1 orang atau 2,2% ,yang menjawab "setuju" 23 orang atau 51,1% dan yang menjawab "sangat setuju" 21 orang atau 46,7% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,44 atau rata-rata menjawab setuju.

Y.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	3	6.7	6.7	6.7
S	15	33.3	33.3	40.0
SS	27	60.0	60.0	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjawab "kurang setuju" 3 orang atau 6,7% ,yang menjawab "setuju" 15 orang atau 33,3% dan yang menjawab "sangat setuju" 27 orang atau 60,0% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,53 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	2	4.4	4.4	4.4
S	16	35.6	35.6	40.0
SS	27	60.0	60.0	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjawab "kurang setuju" 2 orang atau 4,4% ,yang menjawab "setuju" 16 orang atau 35,6% dan yang menjawab "sangat setuju" 27 orang atau 60,0% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,59 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	4	8.9	8.9	8.9
S	19	42.2	42.2	51.1
SS	22	48.9	48.9	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjawab "kurang setuju" 4 orang atau 8,9% ,yang menjawab "setuju" 19 orang atau 42,2% dan yang

menjawab “sangat setuju” 25 orang atau 48,9% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,40 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	3	6.7	6.7	6.7
S	21	46.7	46.7	53.3
SS	21	46.7	46.7	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjawab “kurang setuju” 3 orang atau 6,7% ,yang menjawab “setuju” 21 orang atau 46,7% dan yang menjawab “sangat setuju” 21 orang atau 46,7% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,40 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	2	4.4	4.4	4.4
S	19	42.2	42.2	46.7
SS	24	53.3	53.3	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjawab "kurang setuju" 2 orang atau 4,4% ,yang menjawab "setuju" 19 orang atau 42,2% dan yang menjawab "sangat setuju" 24 orang atau 53,3% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,49 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	2	4.4	4.4	4.4
S	20	44.4	44.4	48.9
SS	23	51.1	51.1	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjawab "kurang setuju" 2 orang atau 4,4% ,yang menjawab "setuju" 20 orang atau 44,4% dan yang menjawab "sangat setuju" 23 orang atau 51,1% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,47 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	1	2.2	2.2	2.2
S	20	44.4	44.4	46.7

SS	24	53.3	53.3	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjawab "kurang setuju" 1 orang atau 2,2% ,yang menjawab "setuju" 20 orang atau 44,4% dan yang menjawab "sangat setuju" 24 orang atau 53,3% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,51 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	3	6.7	6.7	6.7
Valid S	14	31.1	31.1	37.8
d SS	28	62.2	62.2	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjawab "kurang setuju" 3 orang atau 6,7% ,yang menjawab "setuju" 14 orang atau 31,1% dan yang menjawab "sangat setuju" 28 orang atau 62,2% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,56 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

4.3 Uji instrumental penelitian

4.3.1 Uji validitas data

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan

menggunakan metode *produc moment person correlation*. Data dinyatakan valid jika nilai r_{hitung} yang merupakan nilai item dari *corrected Item-Total Correlation* > dari r_{tabel} pada signifikansi 0,05 (5%). Berikut ini disajikan validitas dari masing-masing variabel pada tabel berikut

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	X2.1	0,635	0.294	Valid
	X2.2	0,816	0.294	Valid
	X2.3	0,727	0.294	Valid
	X2.4	0,740	0.294	Valid
	X2.5	0,858	0.294	Valid
	X2.6	0,666	0.294	Valid
	X2.7	0,817	0.294	Valid
	X2.8	0,434	0.294	Valid
	X2.9	0,813	0.294	Valid
	X2.10	0,713	0.294	Valid
Value For Money	X1.1	0,776	0.294	Valid
	X1.2	0,765	0.294	Valid
	X1.3	0,770	0.294	Valid
	X1.4	0,860	0.294	Valid
	X1.5	0,853	0.294	Valid
	X1.6	0,300	0.294	Valid
	X1.7	0,587	0.294	Valid
	X1.8	0,906	0.294	Valid
	X1.9	0,755	0.294	Valid
	X1.10	0,722	0.294	Valid

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Y.1	0,722	0.294	Valid
	Y.2	0,776	0.294	Valid
	Y.3	0,563	0.294	Valid
	Y.4	0,846	0.294	Valid
	Y.5	0,744	0.294	Valid
	Y.6	0,807	0.294	Valid
	Y.7	0,847	0.294	Valid
	Y.8	0,817	0.294	Valid
	Y.9	0,758	0.294	Valid
	Y.10	0,682	0.294	Valid
	Y.11	0,736	0.294	Valid

Sumber : Data diolah diSPSS tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa semua item pernyataan untuk semua variabel adalah valid. Karena nilai *Corrected Item-Correlation* > dari r tabel pada signifikan 0,05 (5%).

4.3.2 Uji realibilitas data

Reliabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuesioner sebagai indikator variabel. Jika jawaban responden tetap stabil dari waktu ke waktu, kuesioner dianggap dapat diandalkan. Untuk mengukur nilai reliabilitas digunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Jika *Conbach Alpha* yang dibangun > 0,60, maka dinyatakan reliabel.

X2.1	0,776	0.294	Valid
X2.2	0.765	0.294	Valid
X2.3	0,770	0.294	Valid
X2.4	0,860	0.294	Valid
X2.5	0,853	0.294	Valid
X2.6	0,300	0.294	Valid
X2.7	0,587	0.294	Valid
X2.8	0,906	0.294	Valid
X2.9	0,755	0.294	Valid
X2.10	0,722	0.294	Valid

Tabel 4.7 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Value For Money (X1)	0,901	0,60	Reliabel
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	0,900	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,928	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel, karena nilai *Cronbach Alpha* dari variabel

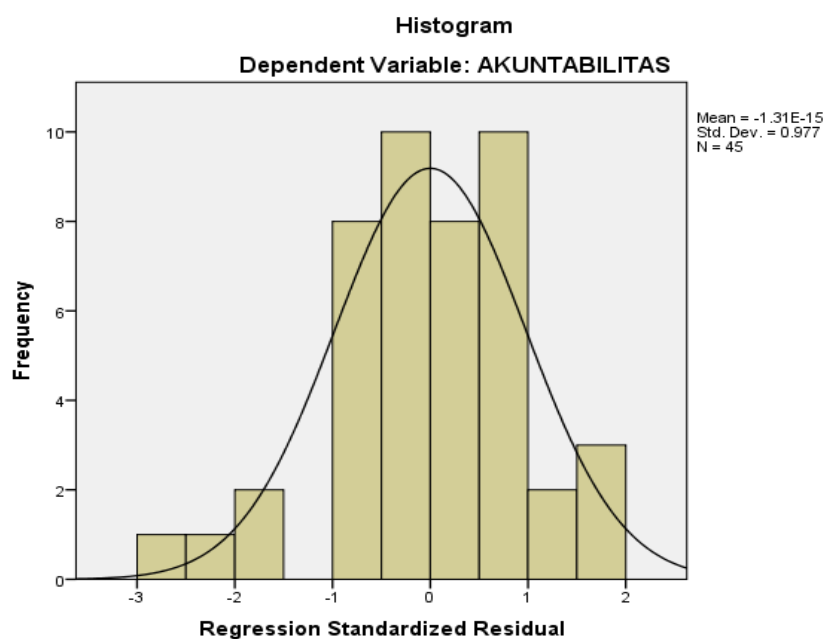
total lebih besar dari 0,60, sehingga cocok digunakan sebagai alat ukur alat angket dalam penelitian ini.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji normalitas

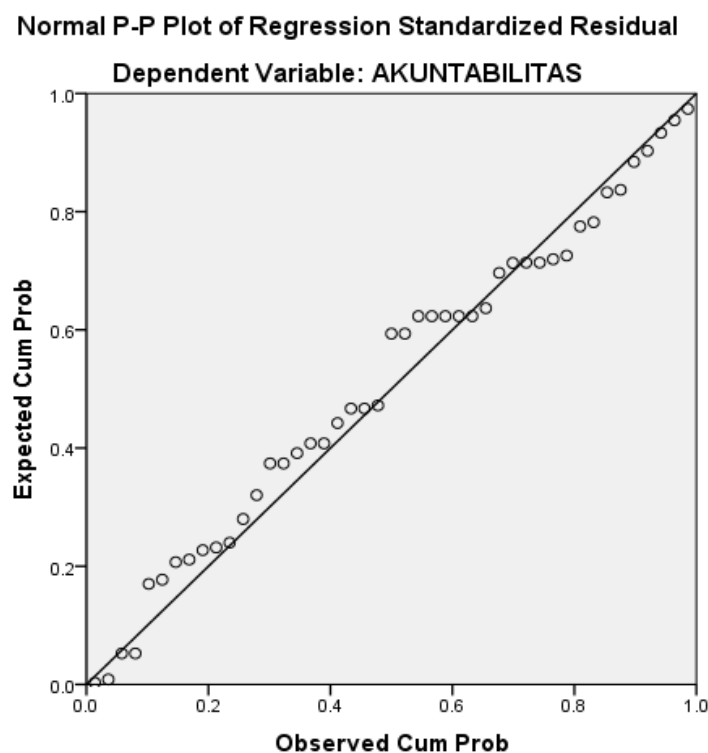
Uji normalitas Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sebaran data yang dianalisis. Uji normalitas ini untuk menguji apakah variabel pengganggu atau variabel residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Dalam menentukan uji selanjutnya, nilai residual harus normal karena jika nilai residual tersebut tidak normal, maka uji statistik akan menjadi tidak valid. Sebagai proses untuk melaksanakan uji normalitas, penelitian ini menggunakan dua tahap dalam penentuan uji normalitas, yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan menggunakan uji statistik Kolmogorov Smirnov. Berikut uji normalitas data dengan menggunakan analisis grafik.

Gambar 4.2 Grafik Histogram Uji Normalitas



Grafik di atas menunjukkan bahwa **distribusi penyebaran residual yang normal**, karena grafik tersebut tidak menunjukkan arah yang condong ke kanan maupun ke kiri. Meskipun dalam grafik tersebut terdapat beberapa residual yang melenceng dari garis, akan tetapi jumlah tersebut dimaklumi karena hanya sedikit. Selain dari grafik di atas, uji normalitas data ini juga dapat dilihat dengan menggunakan grafik normal plot dibawah ini:

Gambar 4.3 Grafik Plot Uji Normalitas



Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Dalam grafik normal plot di atas dapat diketahui **bahwa data residual dalam penelitian ini normal**. Hal tersebut terjadi karena apabila residual berasal dari distribusi yang normal, maka nilai sebaran terletak disekitar garis lurus. Pada gambar grafik di atas juga terlihat bahwa sebaran residual yang dilambangkan

dengan titik atau lingkaran kecil tersebar disekeliling garis diagonal dan mengikuti arahnya sehingga, normalitas dalam penelitian ini terpenuhi.

4.4.2 Uji multikolonieritas

Uji *multikolonieritas* ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Sehingga untuk mengetahui hal tersebut, berikut hasil dari uji *multikolonieritas* dalam penelitian ini:

Tabel 4.8 Uji *Multikolonieritas*

Model		Coefficients ^a			t	Sig.	Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	3.515	4.457		.789	.435		
	Standar Akuntansi Pemerintah (X ₁)	.536	.159	.431	3.369	.002	.385	2.596
	Value For Money (X ₂)	.498	.134	.476	3.719	.001	.385	2.596

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS (Y)

Sumber : Data yang diolah di SPSS, 2020

Berdasarkan hasil dari uji *multikolonieritas* yang dapat dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* yang dapat diperoleh dari masing-masing variabel adalah >0,100. Besar *tolerance* yang dimiliki oleh variabel tersebut adalah, variabel Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 0,385 dan variabel *Value For Money* sebesar 0,385. Sehingga nilai tersebut dapat memenuhi syarat

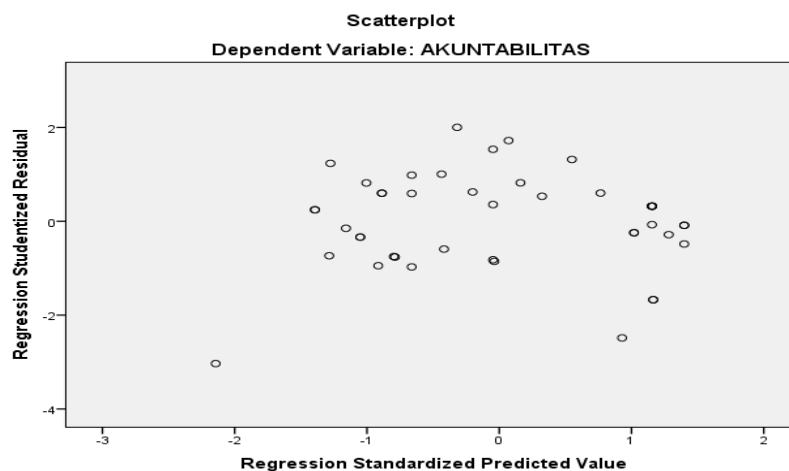
bahwa agar tidak terjadi korelasi antar variabel independen, maka nilai *tolerance* dari masing-masing variabel harus $>0,100$.

Sedangkan untuk standar akuntansi pemerintahan nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) dalam penelitian ini adalah 2.596 dan *value for money* sebesar 2.5960. Oleh karena itu, nilai ini juga memenuhi persyaratan lain dari uji poliklonal ini, yaitu nilai VIF harus kurang dari 10.000. Karena itu, kita bisa mengambil Kesimpulannya **adalah tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas dalam penelitian ini.**

4.4.3 Uji heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* adalah uji yang dilaksanakan untuk menguji apakah di dalam model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan *variance* residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Jika dalam *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut sebagai *homoskedastisitas*. Akan tetapi apabila dalam pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya berbeda, maka disebut *heteroskedastisitas*. Penelitian yang baik adalah penelitian yang menggunakan model regresi yang baik, yaitu dengan menggunakan model regresi yang *homoskedastisitas* atau tidak *heteroskedastisitas*. Berikut hasil pelaksanaan uji *heteroskedastisitas*:

Gambar 4.4 Uji *Heteroskedastisitas*



Gambar di atas merupakan gambar yang diperoleh dari hasil uji *heteroskedastisitas* dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Dari hasil grafik di atas terlihat titik-titik atau lingkaran kecil yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Oleh karena itu, dengan hasil yang demikian dapat diambil kesimpulan bahwa **tidak terjadi *heteroskedastisitas* pada model regresi dalam penelitian ini**. Sehingga, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menggunakan variabel independennya adalah Penerapan standar akuntansi pemerintah dan *value for money*.

Selain menggunakan grafik *scatterplot* di atas, dalam menentukan *heteroskedastisitas* ini juga menggunakan uji *glejser*. Dalam pelaksanaan uji *glejser* tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9 Uji Glejser

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.206	2.732		1.905	.064		
	Standar Akuntansi pemerintah	.004	.098	.011	.045	.964	.385	2.596
	Value for money	-.079	.082	-.233	-.963	.341	.385	2.596

a. Dependent Variable: RES2

Pada tabel uji *glejser* di atas, nilai signifikan yang diperoleh dari uji tersebut adalah sebesar 0,964 untuk variabel standar akuntansi pemerintah dan variabel *value for money* 0,341. Nilai –nilai yang diperoleh seluruh variabel telah memenuhi syarat statistik bahwa nilai signifikan dalam uji ini harus diatas 0,05. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa **model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung adanya *heteroskedastisitas*.**

4.5 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis data dan untuk menguji perumusan hipotesis. Selain itu, analisis regresi linear berganda ini juga dilakukan untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel *value for money* dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor BPKAD Kota

Palopo. Hasil yang diperoleh dari proses perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.515	4.457		.789	.435
Value For Money (X1)	.498	.134	.476	3.719	.001
Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	.536	.159	.431	3.369	.002

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS (Y)

Dari tabel hasil analisis regresi linear berganda di atas, diperoleh koefisien variabel bebas X_1 (Penerapan *Value for money*) sebesar 0,536, 0,498. dan koefisien variabel bebas X_2 (Penerapan standar akuntansi pemerintah) sebesar 0,536. Oleh karena itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah

$$Y = 3,515 + 0,536 x_1 + 0,498 x_2 + e$$

Dimana:

Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

x_1 : *Value For Money*

x_2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

e : Error

Persamaan regresi linear di atas dapat diketahui bahwa:

- a. Nilai konstanta untuk persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik di atas sebesar sebesar 3,515 artinya apabila variabel bebas bernilai nol maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Palopo tetap sebesar 3,515.
- b. Nilai koefisien (β_1) sebesar 0,498 menunjukkan bahwa *value for money* (X_1) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) **adalah positif atau searah**, artinya jika ditingkatkan variabel *value for money* sebesar satu satuan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,498.
- c. Nilai koefisien (β_2) sebesar 0,536 menunjukkan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (X_2) terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) **adalah positif atau searah**, artinya jika ditingkatkan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar satu satuan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,536.

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji koefisien determinasi adjusted (*R Square*)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi R^2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Koefisien Determinasi Adjusted R²**Model Summary^b**

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.857 ^a	.735	.722	2.60538	1.781

a. Predictors: (Constant), Value for money, Penerapan standar akuntansi pemerintah

b. Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN (Y)

Berdasarkan tabel koefisien determinasi di atas yang ditunjukkan oleh Adj. R² dari persamaan regresi menghasilkan nilai sebesar 0,722. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel independen yang terdiri dari penerapan standar akuntansi dan *value for money* terhadap variabel dependen akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 72,2% sedangkan sisanya sebesar 27,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini mengartikan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.6.2 Hasil uji parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen, maka dibandingkan antara nilai hitung dengan tabel serta membandingkan nilai signifikan t dengan *level of significant* (α). Nilai dari *level of significant* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 persen (0,05). Apabila

sig t lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:40)

Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.515	4.457		.789	.435
Standar Akuntansi Pemerintah (X ₁)	.536	.159	.431	3.369	.002
Value For Money (X ₂)	.498	.134	.476	3.719	.001

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS (Y)

Berdasarkan data dari Tabel 4.12 diketahui nilai ttabel pada taraf signifikansi 5 % dengan persamaan sebagai berikut:

$$t_{\text{tabel}} = n - k - 1 : \alpha / 2$$

$$= 45 - 3 - 1 : 0,05 / 2$$

$$= 42 : 0,025$$

$$= 1,680$$

keterangan: n : jumlah

k : jumlah variabel bebas

1 : konstan

Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji statistik t untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen :

1. Hasil Pengujian Hipotesis H1

H1: *Value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Untuk melihat pengaruh *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat nilai signifikannya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig.t < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $sig.t > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dari Tabel 4.9. di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,719 > 1,680$ dan $sig.t (0,001) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan **H_1 diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemakaian konsep *value for money* dapat membantu proses pengelolaan anggaran untuk menghasilkan output yang optimal dan efisien dalam pengadaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan dengan biaya terendah, memelihara sumber daya serta menghindari kegiatan yang tanpa tujuan dan pengangguran sumber daya. Selain itu dengan konsep *value for money* dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerja karyawan, melaksanakan program yang dapat

memberikan hasil terbaik dengan biaya terendah, sistem pengendalian manajemen sudah memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau tingkat efektivitas program. Pelaporan keuangan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

2. Hasil Pengujian Hipotesis H2

H2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Untuk melihat pengaruh Penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat nilai signifikannya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig.t < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $sig.t > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dari Tabel 4.9. di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,369 > 1,680$ dan $sig.t (0,002) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan **H_1 diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Weskornis (2018), penerapan standar akuntansi pemerintahan mengharuskan semua organisasi yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait memiliki pemahaman yang utuh. Setiap kebijakan yang

dibuat oleh pemerintah wajib dilaksanakan, akan tetapi dalam penerapan tersebut perlu dipahami beberapa dasar pemikiran yang penting hingga diharapkan dapat membantu penerapan standar akuntansi pemerintahan. Dalam penelitian ini, penerapan standar akuntansi pemerintahan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, ini berarti jika standar akuntansi pemerintahan diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No 71 Tahun 2010 maka laporan keuangan pemerintah di Kota Palopo akan lebih berkualitas, serta juga akan berkali-kali mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Dan akuntabilitas keuangan Negara pemerintahan tersebut menjadi jelas dan lengkap.

4.6.3 Hasil uji simultan (Uji f)

Uji statistik F dilaksanakan dengan tujuana untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas atau variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Hasil dari uji statistik F ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.13 Hasi Pengujian Simultan (Uji f)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	790.148	2	395.074	58.202	.000 ^b
Residual	285.096	42	6.788		
Total	1075.244	44			

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS

b. Predictors: (Constant), Valueformoney, Standar akuntansi Pemerintah

Pada tabel 4.13 di atas dapat dilihat nilai F sebesar 58,202 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan nilai yang jauh lebih dari 0,05. Oleh karena itu, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain bahwa, ***value for money* dan penerapan standar akuntansi pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.**

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh *value for money* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Hipotesis kedua penelitian ini adalah untuk menguji apakah *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel *value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor BPKAD Palopo. Hal ini terlihat dari uji hipotesis, koefisien regresi (β_1) sebesar 0,498, dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *value for money* akan meningkatkan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah. *Value for money* terkait dengan tolok ukur dalam anggaran organisasi sektor publik. Menurut Mahsun (2006: 132) *value for money* adalah evaluasi kinerja yang didasarkan pada ukuran ekonomi dan efisiensi. Dan efektivitas. Secara khusus, pemerintah daerah telah mampu menggunakan aspek ini dalam

pengelolaan keuangan daerah dan sumber daya publik yang akuntabel kepada publik. Penerapan konsep value for money dalam proses penggunaan anggaran dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya, dan aspek efektif penggunaan anggaran sejalan dengan visi, dan misi sasaran manfaat dapat tercapai sesuai dengan tujuan kepentingan masyarakat, sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Primayani (2014) dan Shinta (2017) yang meyakini bahwa *value for money* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi sektor publik dengan kinerja biaya tinggi akan menghasilkan target output yang baik.

4.7.2 Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Hipotesis pertama penelitian ini adalah menguji apakah terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini terlihat dari pengujian hipotesis dengan koefisien regresi (β_2) sebesar 0,536 dan memiliki nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan akan berdampak akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, artinya apabila standar akuntansi pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010,

maka akan berdampak pada penerapan standar keuangan pemerintah. laporan keuangan pemerintah Pelaporan akan lebih berkualitas, dan akan berkali-kali. Mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Pertanggungjawaban pemerintah atas keuangan nasional menjadi jelas dan lengkap.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudita (2017) dan Zeyn (2011) yang berpendapat bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena pemerintah telah mampu untuk menerapkan basis kas untuk mengakui pendapatan dan pengeluaran, serta selalu mengoreksi setiap kesalahan dalam penyajian laporan keuangan sehingga ini menjadi bukti dari Kota Palopo yang sudah empat kali memenangkan WTP dari BPK atas pertanggungjawabannya dalam mengelola laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka pengujian dan pembahasan hipotesis yaitu Pengaruh *value for money* dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor BPKAD Kota Palopo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Sehingga hipotesis kedua diterima.
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Sehingga hipotesis pertama diterima.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah disusun semaksimal mungkin namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu dikembangkan dalam penelitian selanjutnya antara lain:

1. Kurangnya pemahaman dan sikap kepedulian dari responden di dalam menjawab pernyataan kuesioner yang diberikan peneliti. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan melengkapi penelitian dengan metode survei wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dari responden dalam menjawab pernyataan kuesioner peneliti.

2. Peneliti hanya menggunakan dua variabel independen untuk mempengaruhi Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

5.3 Saran

Berdasarkan evaluasi dari keterbatasan yang ada atas hasil penelitian, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan sampel yang lebih banyak.
2. Pengumpulan data pada penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya sebatas penyebaran kuesioner saja tetapi dapat juga dilakukan dengan pengamatan, dokumentasi, observasi serta wawancara langsung ke objek penelitian.
3. Kehadiran peneliti pada saat responden melakukan pengisian kuesioner sangat ditekankan untuk memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi agar data yang diperoleh nantinya tidak bias dan sesuai dengan tujuan dan apa yang diharapkan dalam penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Anita Daun Lamba (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kantor BPKAD Kota Palopo).
- Bastian, I. (2019). *Lingkup Akuntansi Sektor Publik. Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- Davis, J. H., Schoorman, F. Davi., dan Donaldson, Lex. 1997. *Towards a Stewardship Theory of Management. Academy of Management Review*, 221, 20–47.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. Universitas Semarang. Semarang.
- Hasanah, Y. A., Sasongko, N., & Bawono, A. D. B. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Internal Audit, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Skpd Di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo). *The 9th University Research Colloquium (Urecol)*, 9(5).
- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Julie Abdullah (2018), Pengaruh Penerapan Dimensi *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Maya Angelicca (2019), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Studi Di Pemerintah Daerah Kab. Lamandau Kalimantan Tengah.
- Mulyani, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, *Value For Money*, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018) (Doctoral dissertation, Universitas STIKUBANK).
- Nunuy Nur Afiah. 2009. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan pemerintah Daerah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nunuy Nur Afiah. 2009. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan pemerintah Daerah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nurwulan, Dkk (2019) Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kinerja *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survey Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan, Badan Pendapatan Daerah dan Inspektorat Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2019 Tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pramuditia (2017) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi , *Value For Money*, Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Ponogoro).

Purba R, B (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*. Vol 8 (1).

Sako, U., & Lantowa, F. D. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Sayuti. 2018. Perwujudan Nilai-Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value For Money* dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada Bappeda Kabupaten Gowa. Skripsi. Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

SELVI, M. (2020). Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Palopo).

Shintia(2017), Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Pengendalian Internal Dan *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Kudus).

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Cetakan Ketujuh Belas. Alfabeta. Bandung.

Syarifudin M, Kms (2020) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat *Value For Money* Daerah Pemerintah Kota Palembang). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Wahida, N. 2015. Pengaruh Penyajian Lpaoran Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas.

Wahida, N. 2015. Pengaruh Penyajian Lpaoran Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas.

Yani, A. A.(2020), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruar, Konsep *Value For Money*, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Daerah Di Era Digital (Di Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bkad) Provinsi Sulawesi Selatan).